

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI
YANG BERIMPLIKASI TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**
(Studi Kasus Program Dana Bergulir Unswagati Cirebon)

Siti Khumayah

(Universitas Swadaya Gunung Jati)
mayasiti09@ymail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan kebijakan pemberian bantuan dana bergulir dari Unswagati Cirebon terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang menerimanya (studi kasus di Desa Pangenan Kabupaten Cirebon), sehingga penelitian ini mengidentifikasi bagaimana strategi implementasi yang dilakukan; bagaimana pengendalian implementasi dari strategi pemberian dana bergulir bagi masyarakat ekonomi tidak mampu juga bagaimana dampak yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori J.M Keynes dalam Suharto dimana kesejahteraan atau Welfare mengandung konsep : 1) terpenuhinya kebutuhan material dan non material; 2) Mendapatkan pelayanan sosial yang baik, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial secara personal atau individu; 3) Proses atau usaha terencana yang dilakukan baik oleh perorangan, lembaga sosial, atau lembaga lain dan juga oleh badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data Primer dalam penulisan ini diperoleh dari hasil penjajagan dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan data pendukung yang diperoleh dari sumber nya, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, observasi, dan wawancara secara mendalam, sehingga pembahasannya mengarah kepada bahwa kebijakan Rektor Unswagati untuk pemberian pinjaman dana bergulir bagi masyarakat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik material maupun non material, dengan indikator masyarakat yang telah meminjam dana bergulir dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti kesehatan dan pendidikan, sesuai dengan skala atau standar kebutuhan hidupnya.

Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah : bahwa 1) Implementasi Pemberian bantuan pinjaman dana bergulir bagi masyarakat ekonomi tidak mampu merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat tepatnya bagi kalangan ekonomi tidak mampu, Implementasi kebijakan dikendalikan dengan berpegang pada prinsip kesejahteraan yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar hidup seperti kesehatan dan pendidikan, adapun rumah tinggal blm tercukupi mengingat jumlah nominal pinjaman yang masih kecil.

Pendahuluan

Melonjaknya beberapa harga kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar hidup lainnya yang diakibatkan oleh kebijakan Pemerintah dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mengakibatkan penambahan jumlah penduduk miskin dan pengangguran di beberapa Wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten dan Kota Cirebon. Dari data

Biro Pusat Statistik Kabupaten Cirebon mencatat terdapat pencari kerja sebesar lebih kurang 5876 orang dalam setiap tahunnya, belum lagi penduduk miskin yang terkonsentrasi di daerah-daerah pedesaan dengan mayoritas penghasilan penduduknya hanya sebesar Rp.20.000,- per hari yang didominasi oleh penghasilan para laki-laki (suami) sedangkan para wanita (istri) hanya bekerja sebagai ibu

rumah tangga biasa. (data statistik Kabupaten Cirebon tahun 2012).

Penanggulangan masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi program pemberdayaan, diantaranya potensi sumber daya, pemberdayaan kelembagaan melalui penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Mardikanto (2006), menyatakan bahwa proses pemberdayaan adalah sebagai proses perubahan, sebagai proses pembelajaran, sebagai proses penguatan kapasitas, sebagai proses perubahan sosial, sebagai proses pembangunan masyarakat dan sebagai proses pengembangan partisipasi masyarakat.

Perguruan Tinggi merupakan lembaga dan wadah yang diharapkan oleh semua lapisan masyarakat untuk menjadi solusi setiap persoalan yang terjadi di masyarakat, karena darisini akan melahirkan tenaga dan pemikiran – pemikiran pencerahan bagi setiap persoalan bangsa, Universitas Swadaya Gunung Jati (Uns wagati) sebagai Lembaga yang

bergerak di Pendidikan Tinggi merasa terpanggil untuk turut berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran tersebut, atas kepedulian Rektor selaku pimpinan tertinggi lembaga mengeluarkan kebijakan yang fenomenal yaitu memberikan guliran bantuan dana secara bergilir bagi pedagang kecil dan menengah dengan persyaratan yang mudah dan tanpa dikenakan agunan dan bunga, pengembalian pinjaman ini dilakukan dengan cara mengangsur atau mencicil sebanyak sepuluh kali dalam setiap peminjaman dalam periode waktu angsuran dilakukan setiap minggu dalam setiap kali mengangsur, sehingga setiap pinjaman akan dikembalikan dalam jangka waktu lebih kurang 2,5 bulan.

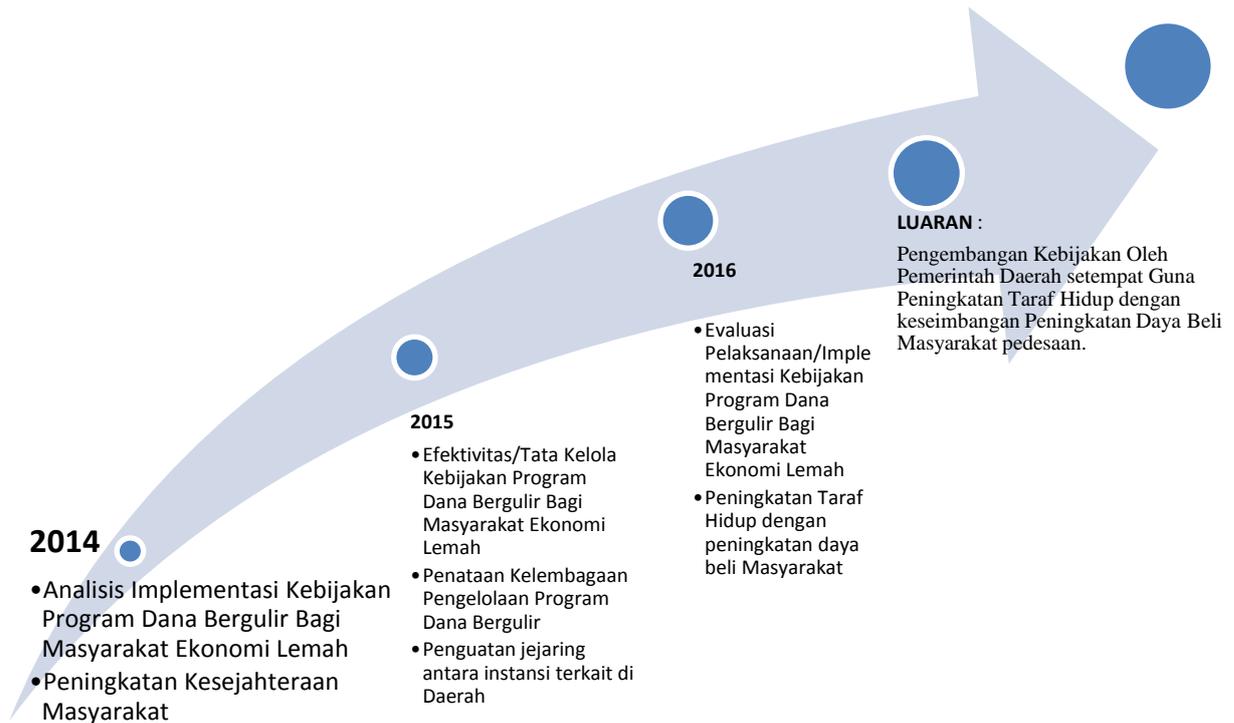
Tujuan Penelitian

1. Bagaimanakah penerapan strategi implementasi kebijakan;
2. Bagaimana tingkat pengendalian implementasi kebijakan;
3. Bagaimana dampak implementasi kebijakan program dana bergilir bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

I. Operasional Variabel

Variabel	Operasional	Indikator
Implementasi Kebijakan (Edward Freeman)	1. Strategi Implementasi (Pra Implementasi) 2. Pengorganisasian (<i>organizing</i>) 3. Penggerakan dan Kepemimpinan 4. Pengendalian	- Identifikasi permasalahan - Formulasi kebijakan Legitimasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan
Kesejahteraan	1. Kondisi Sejahtera 2. Pelayanan Sosial 3. Tunjangan Sosial	- Kebutuhan material - Kebutuhan non material

	4. Peningkatan Taraf Hidup	Pelayanan sosial - Tunjangan orang miskin - Tunjangan orang pengangguran Peningkatan daya beli
--	----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Pembahasan

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan adalah salah satu hal yang harus diperhatikan guna keberhasilan dari suatu kebijakan yang telah disahkan untuk di evaluasi yang bertujuan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Implementasi kebijakan sendiri pada prinsipnya adalah melakukan intervensi, oleh karena itu implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. (Riant Nugroho D, 2006).

Mazmanian dan Sabatier mengatakan bahwa langkah berurutan dalam melakukan intervensi atau implementasi adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah yang harus diintervensi

2. Menegaskan tujuan yang hendak dicapai
3. Merancang struktur proses implementasi

Secara rinci kegiatan di dalam manajemen implementasi kebijakan dapat disusun berurutan sebagai berikut : (Edward Freeman; 1996)

1. Strategi Implementasi (Pra Implementasi)
2. Pengorganisasian (*organizing*)
3. Penggerakan dan Kepemimpinan
4. Pengendalian

Tujuan Implementasi kebijakan sendiri adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab :

1. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan itu sendiri;

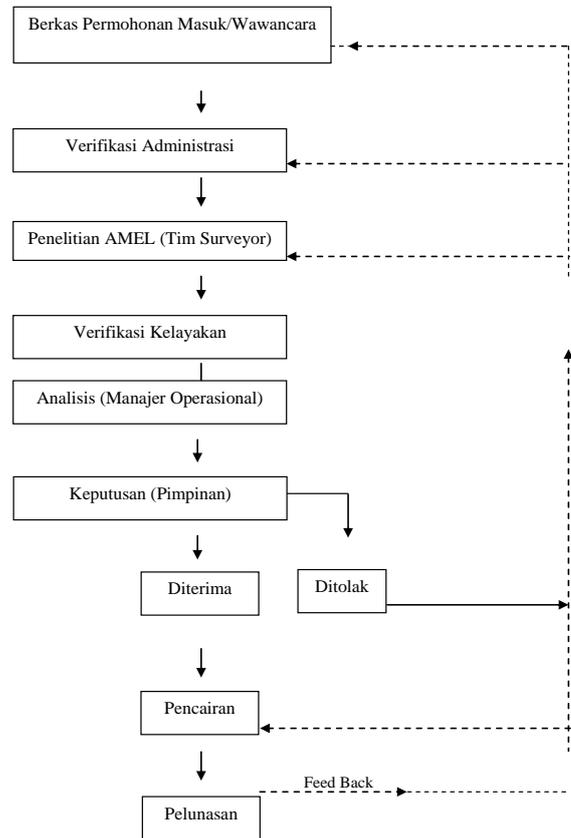
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu;
3. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan.

Program Dana Bergulir Unswagati bertujuan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah yang mempunyai usaha kecil atau mikro dengan cara berdagang ataupun bagi masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan dan berminat atau berniat untuk berdagang tetapi terkendala oleh faktor permodalan, dengan kebijakan Rektor selaku pimpinan tertinggi Universitas digulirkan dana pinjaman kepada masyarakat dengan tanpa bunga, tanpa agunan dan tanpa biaya administrasi. Jenis usaha masyarakat yang didominasi oleh sektor perdagangan pedagang kecil dan menengah yang banyak tersebar diseluruh penjuru tanah air merupakan aset berharga bangsa dari sisi perekonomian negara sehingga pada saat bangsa ini mengalami detik-detik kegentingan ekonomi pada Tahun 1997, sektor ini telah mampu membuktikan sumbangsihnya untuk tetap kokoh berdiri menopang perekonomian negara dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang stabil.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin dengan berlandaskan kepada fenomena dan pengidentifikasian suatu kebutuhan dan peristiwa yang kemudian diformulasikan menjadi suatu kebijakan yang disahkan menjadi suatu produk baik perundangan, peraturan maupun keputusan yang akan teruji tingkat keberhasilannya pada tahapan implementasi. Kebijakan Rektor Unswagati selaku pimpinan tertinggi Universitas untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan perekonomian bangsa yaitu membantu masyarakat ekonomi lemah atau para pedagang kecil dan menengah dari sisi permodalan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat meskipun tugas utamanya adalah bidang pendidikan tinggi sehingga

kebijakan ini mampu menarik masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam bidang pembangunan ekonomi yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

ALUR PROSES PINJAMAN DANA BERGULIR



Evaluasi kebijakan sendiri dilakukan dengan cara berpedoman pada alur kebijakan yang dibuat sebagai pedoman untuk mengukur tingkat keberhasilan dimana tujuan dari setiap kebijakan pimpinan adalah bertujuan untuk pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan adalah proses berkelanjutan dan berkesinambungan yang semula tidak ada menjadi ada atau yang semula kecil menjadi besar (Saraswati, 2009)

Pembangunan masyarakat sendiri adalah proses mensejahterakan masyarakat dengan peningkatan-peningkatan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak bagi pengembangan diri dan keluarganya.

Kesejahteraan rakyat lebih identik dengan kesejahteraan negara (*welfare state*) yaitu negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Keynes (2006) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : 1) Demokrasi; 2) Penegakan Hukum; 3) Perlindungan Hak Asasi Manusia; 4) Keadilan Sosial; dan 5) Anti Diskriminasi.

Keynes dalam Suharto (2006) juga menyebutkan bahwa pengertian kesejahteraan sosial (*social welfare*) sedikitnya mengandung 4 (empat) makna, yaitu :

1. Sebagai kondisi sejahtera (*well being*) yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material;
2. Sebagai pelayanan sosial (*social security*) yaitu pelayanan terhadap kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial personal;
3. Sebagai tunjangan sosial, diberikan kepada orang miskin, pengangguran dan cacat;
4. Proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup.

Kesejahteraan yang dapat diberikan dari suatu implementasi kebijakan pimpinan lembaga pendidikan tinggi adalah mampu membuat rasa aman dan nyaman bagi setiap pengguna kebijakan yang dalam hal ini adalah masyarakat

sebagai obyek dari kebijakan yang dibuat, karena perguruan tinggi masih mendapatkan tingkat kepercayaan tinggi dari masyarakat sebagai lembaga yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat disamping tugas pokoknya dibidang pendidikan. Tingkat kenyamanan dan kepercayaan masyarakat tersebut merupakan implementasi dari kesejahteraan non materil yang berdampak diikutinya tingkat kesejahteraan materil dengan meningkatnya sarana pemenuhan kebutuhan hidup dengan jalan turut membantu implementasi kebijakan dengan cara meminjam program dana bergulir.

Ketika masyarakat mendapatkan tingkat kesejahteraan, maka secara bersama-sama disitulah terjadi peningkatan daya beli yang diakibatkan oleh meningkatnya tingkat penghasilan dan keterampilan masyarakat itu sendiri, hal ini pun akan diimbangi dengan penghargaan dari masyarakat lain berupa pelayanan sosial yang merupakan bagian tak terpisah dari kebutuhan masyarakat, baik pelayanan sektor publik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta dengan melihat dari perbaikan secara performance, pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang dilayani yang telah meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya sebagai akibat dari adanya suatu kebijakan yang terimplementasikan dengan tepat yang berpedoman kepada kontrol organisasi, pengendalian dan evaluasi berperiodik guna keberhasilan kebijakan yang telah disyahkan.

**ROAD MAP PENELITIAN
KEBIJAKAN REKTOR UNSWAGATI TENTANG PROGRAM DANA BERGULIR**

2014	2015	2016
Strategi Implementasi Kebijakan Program Dana Bergulir Bagi Masyarakat Ekonomi Lemah	Efektivitas/Tata Kelola Kebijakan Program Dana Bergulir Bagi Masyarakat Ekonomi Lemah	
Tingkat pengendalian implementasi kebijakan program dana bergulir bagi masyarakat ekonomi lemah di Desa Pangenan Kabupaten Cirebon		
Dampak implementasi kebijakan program dana bergulir bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pangenan Kabupaten Cirebon.		
	Penataan Kelembagaan Pengelolaan Program Dana Bergulir	Evaluasi Pelaksanaan/Implementasi Kebijakan Program Dana Bergulir Bagi Masyarakat Ekonomi Lemah
	Penguatan jejaring antara instansi terkait di Daerah	
Analisis Implementasi Kebijakan Program Dana Bergulir Bagi Masyarakat Ekonomi Lemah		
Tingkat pengendalian implementasi kebijakan program dana bergulir bagi masyarakat ekonomi lemah di Desa Pangenan Kabupaten Cirebon		
Dampak implementasi kebijakan program dana bergulir bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pangenan Kabupaten Cirebon.		

Kesimpulan

implementasi kebijakan adalah salah satu hal yang harus diperhatikan guna keberhasilan dari suatu kebijakan yang telah disahkan untuk di evaluasi dan bertujuan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Demikian juga dengan implementasi kebijakan yang dihasilkan dari Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun kebijakan tersebut tidak berhubungan langsung dengan bidang pokok organisasi yaitu berfokus pada bidang pendidikan, namun bagaimanapun setiap kebijakan yang dikeluarkan harus dapat dievaluasi tingkat keberhasilannya yang berawal dari implementasi yang dijalankan yang sesuai dengan alur kebijakan yang dibuat.

Kebijakan pengguliran dana kepada masyarakat ekonomi lemah guna membantu permodalan perdagangan kecil menengah dengan dikelola dan berpedoman pada alur kebijakan serta pelaksanaan, pengawasan, dan pengorganisasian yang matang maka dapat menghasilkan sumbangsih kepada bangsa dan negara khususnya bagi

pedagang kecil dan menengah yang berada disekitar wilayah jangkauan tempat kebijakan dikeluarkan, terbukti dengan meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat yang berawal dari meningkatnya tingkat pendapatan keluarga dimana para ibu rumah tangga dapat berperan menopang ekonomi keluarga dengan berdagang ataupun para suami dapat meningkatkan jumlah ataupun ragam dagangan sehingga dagangannya lebih beragam dan lebih mempunyai nilai jual ketika dijajakan, hal ini dikarenakan mereka menggunakan dan memanfaatkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Rektor dalam hal ini Rektor Unswagati sebagai Pimpinan tertinggi Universitas yang telah mengeluarkan kebijakan dan didukung oleh seluruh jajaran dengan mengimplementasikannya dengan cara pengorganisasian yang berformulasi tepat dengan sistem pengendalian kebijakan dan pengendalian pemimpin dalam implementasi kebijakan itu sendiri, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat berdaya guna secara optimal bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- D, Riant nugroho.(2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nawawi, Hadari dan Hadari, Martini. (2006). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Saraswati, 2009, *Status ekonomi*, Media Pustaka, Jakarta
- Suharto, Edi (2006), “Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran Desentralisasi dan *Good Governance*”, makalah yang disampaikan pada *Semiloka Kompetensi Sumberdaya Manusia Kesejahteraan Sosial di Era Desentralisasi dan Good Governance*, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarmasin 21 maret 2006
- Suharto, Edi (2005a), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama
- Suharto, Edi (2005b), *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta